

**BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA ERA JOKO
WIDODO TERKAIT ETNIS ROHINGYA TAHUN 2014-2019**

Skripsi

Oleh

FERIZKA METRISIA ANDRAYASA

NPM 1946071003



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA ERA JOKO WIDODO TERKAIT ETNIS ROHINGYA TAHUN 2014-2019

Oleh

FERIZKA METRISIA ANDRAYASA

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis di Myanmar yang telah mengalami banyak sekali penindasan. Konflik ini sendiri telah menjadi atensi dunia internasional yang membuat beberapa negara menaruh atensinya pada konflik etnis Rohingya. Salah satu dari beberapa negara itu adalah Indonesia. Pemerintah RI turut berperan pada konflik etnis ini melalui bantuan luar negerinya kepada etnis Rohingya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bantuan luar negeri pemerintah RI kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo dan mendeskripsikan alasan pemberian bantuan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi pada topik penelitian penulis secara jelas dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada penelitian ini. Teknik dokumentasi kualitatif digunakan pada pengumpulan data penelitian ini untuk menggali lebih dalam informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui sumber-sumber yang didapatkan secara daring, dimana informasi yang diperoleh tersebut dapat dianalisis penulis. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dimana data-data tersebut berasal dari sumber terdahulu seperti laman Deutsche Welle, Setkab, Antara News, dsb.

Penelitian ini menemukan hasil riset, yaitu bantuan luar negeri pemerintah RI meliputi 3 tujuan bantuan luar negeri, yaitu bantuan pada kemanusiaan, pembangunan dan diplomatik. Pada kemanusiaan, pemerintah RI mengirimkan bantuannya berbentuk kebutuhan pokok. Pada pembangunan, pemerintah RI membangun infrastruktur di Rakhine seperti sekolah dan rumah sakit. Pada diplomatik, Indonesia melakukan dialog, diskusi dan pertemuan dengan Myanmar ataupun negara lain seperti Bangladesh. Penyaluran bantuan-bantuan tersebut dilaksanakan di setiap tahun pada periode pertama era Joko Widodo, yaitu tahun 2014-2019.

Kata Kunci: Pemerintah RI, etnis Rohingya, bantuan luar negeri.

ABSTRACT

THE RI GOVERNMENT'S FOREIGN AID IN THE JOKO WIDODO ERA REGARDING THE ROHINGYA ETHNICITY IN 2014-2019

By

FERIZKA METRISIA ANDRAYASA

The Rohingya ethnic is one of the ethnicities in Myanmar that has experienced a lot of oppression. This conflict itself has attracted international attention, causing several countries to pay attention to the Rohingya ethnic conflict. One of these countries is Indonesia. The Indonesian government played a role in this ethnic conflict through the foreign aid towards the Rohingya ethnic group. The aim of this research is to describe the Indonesian government's foreign assistance to the Rohingya ethnic group in the Joko Widodo era and to describe the reasons for providing this assistance. This study uses qualitative methods to clearly describe the incidents that occurred on the author's research topic and to answer the research questions in this study. Qualitative documentation techniques were used in collecting this research data to dig deeper into information related to the research topic through online sources, where the information obtained could be analyzed by the author. This research also uses secondary data where the data comes from previous sources such as pages of the Deutsche Welle, Cabinet Secretary of The Republic of Indonesia, Antara News, etc. This research found research results, namely that the RI government's foreign aid includes 3 foreign aid objectives, namely humanitarian, development and diplomatic aid. In humanitarian, the RI government sends aid in the form of basic necessities. In development, the RI government built infrastructure in Rakhine such as schools and hospitals. In diplomatic, Indonesia holds dialogue, discussions and meetings with Myanmar or other countries such as Bangladesh. The distribution of this aid was carried out every year in the first period of the Joko Widodo era, namely 2014-2019.

Keywords: The RI Government, Rohingya ethnicity, foreign aid.

**BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA ERA JOKO
WIDODO TERKAIT ETNIS ROHINGYA TAHUN 2014-2019**

Oleh

FERIZKA METRISIA ANDRAYASA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA ERA JOKO WIDODO TERKAIT ETNIS ROHINGYA TAHUN 2014-2019**

Nama Mahasiswa : **Ferizka Metrisia Andrayasa**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1946071003**

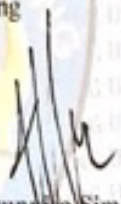
Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP.231801 920926 201


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001

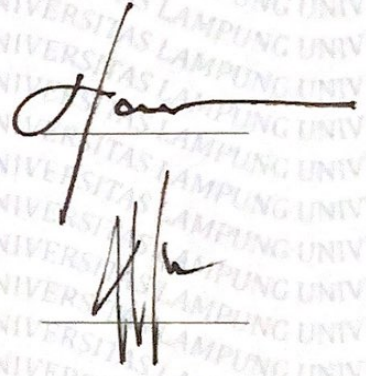
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjoyo H, S.A.N, M.P.A.
NIP. 198106282005011003

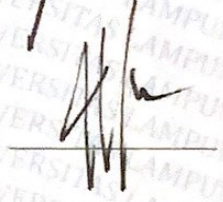
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

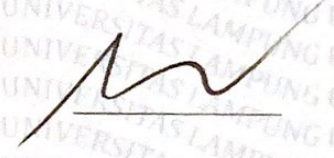
Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.



Penguji Utama : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Oktober 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Ferizka Metrisia Andrayasa
NPM. 1946071003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 April 2002, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Komaruddin dan Ibu Tri Ismanti. Penulis menempuh pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-26 Bandar Lampung. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 (Persit) Bandar

Lampung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Lampung dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung.

Pada tahun 2019, penulis lulus dari pendidikan wajibnya dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan program studi S-1. Sepanjang masa perkuliahannya penulis turut aktif di dalam aktivitas akademik dalam menulis esai dan artikel. Penulis juga turut aktif di dalam aktivitas Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hubungan Internasional Tahun 2022 menjabat sebagai Sekertaris Umum. Penulis kerap kali mengikuti kegiatan jurusan dan menjabat sebagai panitia. Pada tahun 2022, penulis menempuh program Magang yang dilaksanakan oleh jurusannya sebanyak dua kali, pertama di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada Direktorat Hak Asasi Manusia Departemen Kerjasama Luar Negeri dan yang kedua di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada Direktorat Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Departemen Multilateral Bidang Sosial dan Budaya.

Motto

“Be a better version of yourself. Always be thankful even for the smallest ones.”

“Try to accept how imperfect life is and how imperfect you are and try to find things that can help you become as closest to that perfection.”

– Mark Lee

PERSEMBAHAN

Teruntuk Ayah dan Umi tercinta

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT sebab atas berkah dan rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi yang berjudul “*Bantuan Luar Negeri Pemerintah RI pada Era Joko Widodo Terkait Etnis Rohingya Tahun 2014-2019*” sebagaimana merupakan salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Melalui kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang sebagaimana telah berkenan dan bersedia dalam membimbing, memberikan saran dan menyempatkan waktunya untuk membantu penulis selama pengerjaan skripsi;
4. Mbak Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang senantiasa membantu, membimbing dan memberikan masukan terhadap penulis dalam pengerjaan skripsi;
5. Madame Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang selama rangkaian sidang seminar dan skripsi telah memberikan pengetahuan baru, masukan, serta koreksian untuk menunjang skripsi penulis menjadi semakin baik;
6. Seluruh dosen dan staf Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam memberikan banyak wawasan, ilmu, pengalaman dan waktu kepada penulis sejak awal perkuliahan;
7. Keluarga penulis, Ayah, Umi, Kakak dan Adik, yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis sepanjang studinya;

8. Sahabat-sahabat seperjuangan masa kuliah penulis, Nafisa Rabbani, Syaifa Nanda, Haura Dzikra dan Dhebitra Tasya, yang selalu mendukung, menyemangati dan berdiri disebelah penulis dalam keadaan apapun;
9. Segenap teman-teman kuliah lainnya, Dina Eriana dan Farraas Nabiila, yang telah menyemangati penulis;
10. Sahabat penulis sejak di jenjang SMP, Rumaisha Afifah, yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
11. Sahabat penulis di SMA, Akbar, Adisa, Shantika, Renastra, Hanny, Dhea, Sona, Iqbal, Rhenada, Ifa dan Romi, yang telah mendukung penulis;
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
13. *Last but not least, to myself, I would like to thank me for my hard work since the beginning of the study until during the thesis, thank me for sticking around during the hard time, thank me for always trying to be a better version of myself;*

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Ferizka Metrisia Andrayasa

NPM. 1946071003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR SINGKATAN	V
I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PENELITIAN TERDAHULU	8
1.3 RUMUSAN MASALAH	13
1.4 TUJUAN PENELITIAN	14
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 TEORI BANTUAN LUAR NEGERI	15
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 TIPE PENELITIAN	26
3.2 FOKUS PENELITIAN	26
3.3 JENIS DAN SUMBER DATA.....	27
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	29
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA.....	30
3.5.1 Kondensasi Data	30
3.5.2 Tampilan Data	31
3.5.3 Pengambilan dan Pemvalidasian Kesimpulan.....	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 SEKILAS MENGENAI ETNIS ROHINGYA.....	33
4.2 BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA ERA PERTAMA JOKO WIDODO KEPADA ROHINGYA.....	36
4.2.1 BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA TUJUAN KEMANUSIAAN	40
4.2.2 BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA TUJUAN PEMBANGUNAN.....	46
4.2.3 BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA TUJUAN DIPLOMATIK.....	49

4.3 ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI KEPADA ROHINGYA ERA PERTAMA JOKO WIDODO	56
V. SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 SIMPULAN	62
5.2 SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian terdahulu.....	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Angka Populasi Pengungsi di Bangladesh Tahun 2019.....	3
Gambar 2. Grafik Asal Wilayah Pengungsi di Indonesia	4
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	25

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
DAC	: <i>Development Assistance Committee</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
Jokowi	: Joko Widodo
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KNSR	: Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya
KTT ASEM	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Europe Meeting</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Menlu	: Menteri Luar Negeri
MER-C	: <i>Medical Emergency Rescue Committee</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OECD	: <i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>
OIC	: <i>Organization of Islamic Cooperation</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	: Palang Merah Indonesia
RI	: Republik Indonesia
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar. Pada konstitusi tahun 1947, nama negara Myanmar dahulunya adalah Burma, namun di tahun 1989 pemerintahan militer Burma secara sah mengganti nama negaranya menjadi Myanmar yang kemudian 5 hari setelah proklamasi perubahan nama itu dicanangkan, PBB baru mengakuinya (Driss, 2012). Etnis Rohingya merupakan bagian dari negara bagian Rakhine, Myanmar. Rakhine yang dahulunya disebut sebagai Arakan, kemudian mengalami invasi yang dilakukan oleh orang-orang dari etnis Burma dan akhirnya negara bagian tersebut menjadi dikuasai oleh etnis Burma. Hal tersebut menjadi suatu faktor pendorong dari keminoritasan yang dimiliki oleh etnis Rohingya (Mohajan, 2019).

Ditinjau dari historinya, ditemukan bahwasanya kemalangan etnis Muslim Rohingya di negara Myanmar diawali pada tahun 1784. Pada saat itu, provinsi Rakhine yang dipimpin oleh Raja Buddha menganeksasi kawasan Rakhine ke Myanmar. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran mengenai penyebaran Islam di kawasan itu yang kemudian menjadikan kaum Buddha Burma (Myanmar) melakukan penindasan kepada etnis muslim Rohingya. Selain itu, pada saat Inggris menjajah Myanmar, muslim Rakhine sempat melakukan perlawanan kepada warga Inggris di negaranya dengan menggunakan kekerasan yang membuat Inggris menjadi gentar. Akibat dari hal tersebut, Inggris kemudian mengawali propagandanya agar dapat menyingkirkan dampak muslim (Driss, 2012).

Mayoritas dari etnis Rohingya tidak mendapatkan status kewarganegaraan dari negaranya sendiri, yakni Myanmar. Perangkat hukum yang paling berperan di belakang situasi tak diakuinya

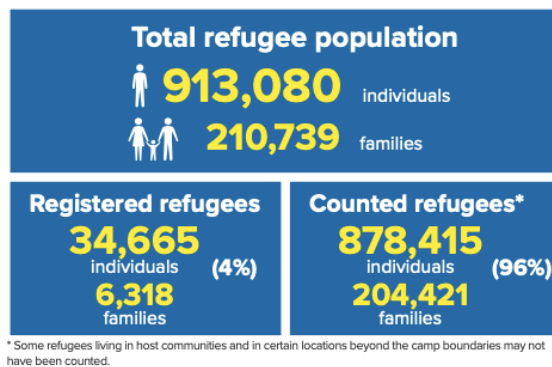
kewarganegaraan etnis Rohingya adalah Undang Undang tahun 1982 mengenai Kewarganegaraan Myanmar. Undang-Undang yang mereka buat ini merupakan peraturan yang secara spesifik menjadikan etnis Rohingya sebagai target mereka. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, warga negara yang diakui oleh mereka adalah para warga yang berketurunan dari sejumlah ras lokal, misalnya Kayah, Kachin, Chin, Karen, Shan, Burman, Mon, ataupun sejumlah ras yang pendahulu/leluhurnya sudah bertempat di Myanmar atau Burma dari sebelum 1823, yang mana ketika itu Inggris memulai kolonisasi negara Arakan selaku akses pokok untuk dapat masuk ke Burma dari daerah British India. Di dalam Undang-Undang tersebut kewarganegaraan dibagi menjadi 3 macam, yakni *naturalized citizenship*, *associate citizenship*, serta *citizenship*. *Naturalized citizen* digolongkan sebagai warga negara yang bisa memverifikasi dirinya sendiri dengan bukti yang kredibel. Lalu, *associate citizen* digolongkan sebagai warga negara yang tidak bisa memverifikasi keberadaan leluhurnya yang sudah berada di Burma sebelum 1823 dan apabila salah satu leluhurnya tersebut berkewarganegaraan dari negara lainnya. Dengan adanya, Undang-Undang mengenai kewarganegaraan ini membuat diskriminasi yang terjadi pada warga etnis Rohingya sendiri kian parah (Susetyo et al., 2016).

Dengan situasi tak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingya sudah memperkuat pendapat negara bahwasanya etnis tersebut hanyalah orang asing atau yang menurut pemerintahan Myanmar, mereka disebut sebagai imigran gelap yang tidak pantas untuk diberikan perlindungan oleh Myanmar. Akibat hal-hal tersebutlah, mayoritas etnis Rohingya dengan sah ditetapkan sebagai bukan penduduk negara Myanmar, melainkan etnis Rohingya merupakan warga asing. Selain itu, etnis ini juga dianggap sebagai komunitas yang tidak mempunyai histori maupun relasi dengan negara Myanmar dan justru etnis Rohingya disebut sebagai orang Bengali (Chickera, 2021).

Dampak dari penindasan dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia pada etnis Rohingya menjadikan mayoritas etnis tersebut dengan terpaksa harus meninggalkan negaranya dan bermigrasi ke negara lainnya.

Hal ini sendiri telah membuat warga Rohingya menetap di negara orang lain sebagai pengungsi. Mayoritas dari pengungsi Rohingya telah memilih Bangladesh sebagai negara untuk bermigrasi karena jarak antara Bangladesh – Myanmar tidak terlalu jauh sehingga para pengungsi banyak yang berdatangan ke negara tersebut (Faye, 2021). Migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingya ke Bangladesh ini sendiri telah terjadi selama bertahun-tahun lamanya, tepatnya dari tahun 1978, 1991 hingga 1992, 2016 hingga 2017. Akan tetapi, sejak tahun 2017 terakhir menjadikan lonjakan pengungsi tertinggi dan terpesat yang datang ke Bangladesh (UNOCHA, 2019).

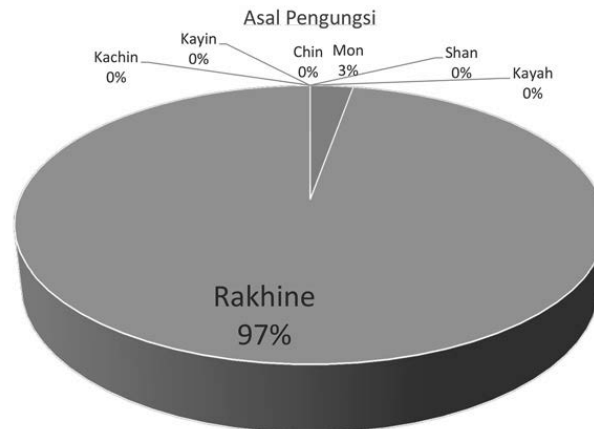
Refugee population figure



Gambar 1. Angka Populasi Pengungsi di Bangladesh Tahun 2019 (UNHCR, 2019)

Selain Bangladesh, pengungsi Rohingya beberapa diantaranya melarikan diri ke negara tetangga, salah satunya adalah Indonesia. Di tahun 2009, sejumlah pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia melalui beberapa kali gelombang. Gelombang pertama terdapat di bulan Januari 2009 yang membawa sebesar 193 pengungsi Rohingya datang melalui Sabang, Malaysia ke Indonesia. Selanjutnya, gelombang kedua terdapat di bulan Februari 2009, dimana sebanyak 198 pengungsi etnis tersebut ditemukan terdampar di laut lepas Indirayo, Aceh Timur. Kemudian di tahun 2015, sekiranya terdapat 1.800 warga Rohingya dan pengungsi Rohingya dari Bangladesh yang secara berangsur-angsur datang ke lautan Indonesia melewati Aceh. Terdapat beberapa orang yang terdampar di Blang Adoe

dan juga Langsa (Sari et al., 2018). Ditinjau dari asalnya, pengungsi-pengungsi Myanmar yang berdatangan ke Indonesia tersebut, sebagian besar bersumber dari daerah negara bagian Rakhine, yakni sebesar 97 persen, sementara yang lainnya bersumber dari wilayah negara bagian Mon, yakni sebesar 3 persen. Sebagaimana, seperti yang terlampir pada grafik di bawah ini (Susetyo et al., 2016).



Gambar 2. Grafik Asal Wilayah Pengungsi di Indonesia (Susetyo et al., 2016)

Indonesia juga turut ikut memberikan bantuan lainnya kepada Rohingya. Tak hanya sekadar menampung serta menanganani para pengungsi Rohingya saja, melainkan Indonesia juga memberikan bantuan internasional kepada Rohingya. Hal ini Indonesia lakukan didasari oleh adanya fakta bahwa terdapat sejumlah pengungsi Rohingya yang melakukan migrasi ke Indonesia demi mendapatkan kemanusiaan dan perlindungan dari Indonesia serta fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang populasi penduduk muslimnya paling besar di dunia, sebagaimana mayoritas etnis Rohingya merupakan penganut agama Islam. Maka dari itu, Indonesia sangat memberikan perhatian kepada kasus Rohingya ini bahkan mengirimkan cukup banyak bantuan kemanusiaan kepada etnis tersebut. Bantuan-bantuan tersebut telah diberikan oleh Indonesia dari tahun 2012 dimana pada saat itu presiden yang memimpin adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bantuan ini sendiri berlanjut hingga ke era kepemimpinan Joko Widodo. Bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia

kepada etnis Rohingya sendiri berupa bantuan kemanusiaan, pembangunan dan diplomatik. Pada tahun 2017, Indonesia memberikan sejumlah program untuk Myanmar yang direkomendasikan oleh Presiden RI, yang diantaranya adalah pendirian rumah sakit untuk warga Rakhine, pendirian sekolah bagi warga Myanmar terkhususnya untuk sejumlah pengungsi Rohingya di Rakhine dan membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan rumah sakit tersebut agar warga Rohingya dapat bekerja di rumah sakit itu ataupun menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah sakit (Saputra, 2020).

Selanjutnya adapun beberapa bantuan lainnya yang diberikan pada etnis Rohingya oleh pemerintah RI. Pada tahun 2015, DPR Republik Indonesia sempat mengungkapkan bahwa mereka memperkenankan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu warga Rohingya khususnya untuk warga yang berlokasi di tempat pengungsian Myanmar dan turut menerima saran-saran yang diberikan oleh lembaga-lembaga kepada pemerintah. Lembaga-lembaga itu juga mengabarkan bahwa mereka akan menyelenggarakan diskusi internasional terkait etnis Rohingya. Pada sebuah kesempatan, Nurhayati Ali Assegaf yang merupakan salah satu anggota dari Komisi I pada Partai Demokrat mengungkapkan sarannya agar lembaga swadaya masyarakat Indonesia bisa berperan aktif serta dapat mengambil atensi warga Internasional untuk lebih memehartikan kasus Rohingya tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Syuhelmaidi Syukur yang merupakan anggota Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) mengatakan bahwa kolaborasi yang ada pada elemen masyarakat di Indonesia dalam rangka menolong Rohingya sendiri telah cukup bagus. Kolaborasi tersebut juga hendak mereka luaskan melalui pembuatan komite internasional serta hendak mengadakan kegiatan diskusi terkait penindasan etnis tersebut. Syuhel juga mengungkapkan bahwa mereka bersedia untuk dijadikan sebagai tuan rumah dan mereka juga telah membentuk akses dan dorongan bersama pemerintah melalui kebijakan. Mereka hendak menunjukan terhadap warga nasional dan internasional bahwa mereka dapat mengampu pengungsi (Komisi I DPR RI, 2015).

Pada sebuah kesempatan Indonesia di tahun 2017 kembali mengirimkan berbagai bantuannya yang berisikan kebutuhan pokok para pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Bantuan itu sendiri berupa tenda tempat pengungsi tinggal, makanan serta pakaian. Pada kesempatan ini juga, Joko Widodo selaku pemimpin negara Indonesia menyampaikan bahwa bantuan tersebut bisa diberikan oleh pemerintah RI dikarenakan adanya pengutusan Menteri Luar Negeri RI untuk berkomunikasi bersama pihak Bangladesh dan juga pihak Myanmar, yang mana pada hal ini ketiga negara tersebut berdiskusi terkait bantuan luar negeri yang dibutuhkan oleh para etnis Rohingya (Tisnadibrata, 2017).

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah RI pada era pertama Joko Widodo ini sendiri meningkat intensitasnya dari yang sebelumnya. Kemudian, apabila ditelaah kembali pemerintah RI dalam membantu Rohingya pada era tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan era pemerintah yang sebelumnya, dimana pada era Joko Widodo, mereka lebih bergerak aktif dalam menangani kasus Rohingya tersebut. Hal ini sendiri didukung dengan adanya sejumlah tindakan yang dijalankan oleh pemerintah RI di era tersebut, beberapa diantaranya adalah pemerintah RI kerap kali mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam rangka membantu Rohingya, seperti melakukan dialog dengan pihak dari pemerintah Myanmar agar mereka dapat mengakhiri dan meminimalisir adanya pelanggaran HAM atau penindasan yang terjadi pada warga Rohingya serta menteri luar negeri juga diminta untuk dapat berdialog dengan Myanmar agar mereka mau memberikan proteksinya kepada seluruh warganya tak terkecuali etnis Rohingya. Pemerintah RI juga memerintahkan Retno Marsudi selaku menteri luar negeri untuk bernegosiasi dengan Myanmar agar mereka dapat membuka akses bantuan kepada penduduk Rohingya yang sempat mereka blokir (BBC News Indonesia, 2017a). Tak hanya itu, pemerintah RI juga sering memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Pada Januari-Februari tahun 2017, pemerintah RI menyumbangkan bantuan medis dan makanan

sejumlah sepuluh kontainer, hingga mendirikan rumah sakit pada negara bagian Rakhine (Waluyo, 2017a).

Pemerintah juga memberikan bantuan kemanusiaannya hingga ke titik pusat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bantuan tersebut berupa makanan instan, beras, pakaian, dll. Hal ini sendiri dapat dilakukan setelah adanya dialog antara perwakilan negara Myanmar dan Bangladesh dengan Menteri Luar Negeri Indonesia (Waluyo, 2017b). Usaha pemerintah RI dalam membantu Rohingya semakin terlihat dengan adanya tindakan pembukaan akses penanam modal asing dari Indonesia kepada Myanmar. Dari adanya upaya dan usaha yang diberikan oleh pemerintah RI pada era Joko Widodo, maka dikatakan pemerintah tersebut lebih aktif dalam menangani kasus Rohingya, sebagaimana pula pemerintah RI menuangkan segala keseriusannya melalui berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menolong etnis tersebut (Saputra, 2020). Sedangkan, di era pemerintah RI sebelumnya ditemukan fakta bahwa pemerintah tersebut tidak mengimplementasikan kebijakan yang teguh dan koheren pada penanganan kasus etnis Rohingya. Hal tersebut didukung dengan tak adanya fakta mengenai usaha nyata presiden sebelumnya dalam menangani peristiwa kemanusiaan baik di tingkat kawasan yakni ASEAN maupun di tingkat global yakni PBB. Yang didapati pada pemerintah tersebut adalah kebijakan yang senyap dimana mereka tidak bergerak secara aktif dalam mendorong etnis Rohingya (Nurhandayani, 2013).

Melalui pembahasan di atas, terdapat beberapa faktor yang membuat pemerintah RI pada era Joko Widodo selaku pemimpin negara memberikan bantuan luar negerinya sendiri pada etnis Rohingya terutama mengenai fakta bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi undang-undangnya yang berlandaskan atas perdamaian, keadilan sosial dan ketertiban dunia. Melalui hal-hal tersebut terdapat suatu jembatan yang menghubungkan antara kekerasan yang dialami etnis Rohingya dengan pemberian bantuan luar negeri pemerintah RI pada era Joko Widodo kepada etnis Rohingya. Kemudian, dari yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa perbedaan yang lumayan kentara antara pemerintah RI di era Joko Widodo seperti

aktifnya bantuan yang pemerintah tersebut berikan kepada etnis itu sendiri hingga mengirim Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar untuk melakukan dialog, sementara pada pemerintah yang sebelumnya tidak ditemukan fakta dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya. Dengan adanya fakta-fakta yang termuat di atas menjadikan pemerintah RI pada era Joko Widodo memperoleh banyak apresiasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teori bantuan luar negeri yang berfokus pada indikator tujuan bantuan luar negeri yang dikirimkan oleh negara pendonor kepada negara penerima untuk dapat membantu menjawab pertanyaan penelitiannya. Penelitian ini sendiri diharapkan dapat memperoleh sejumlah informasi bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah RI pada era Joko Widodo serta alasan pemerintah RI dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo serta faktor yang menjadikan pemerintah RI pada era Joko Widodo tersebut mendapatkan banyak apresiasi maupun pujian dan menjadi pemerintah RI yang lebih aktif pada kasus Rohingya tersebut.

1.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Teori/Konsep	Hasil Penelitian
1.	Mohammad Zaidi dan Akhmad Baihaqie	Penelitian kualitatif	Konsep analisis domestik	Hasil dari penelitian artikel ini menemukan bahwasanya Indonesia sendiri dalam menanggapi konflik ini telah melakukan sejumlah upaya, yakni: 1. Merekomendasikan adanya resolusi politik dengan mengadakan konferensi bilateral bersama negara Myanmar, 2. Mengizinkan adanya pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia serta memfasilitaskan mereka tempat yang tenteram,

				walaupun Indonesia sendiri bukan bagian dari Protokol Pengungsi 1967 dan Konvensi Pengungsi 1951, 3. Menghibahkan sejumlah bantuan kemanusiaan dengan membangun fasilitas sekolah di daerah konflik, 4. Ikut berperan aktif dalam mendorong ASEAN agar dapat memberikan langkah nyata pada konflik ini (Abdul Rahman & Baihaqie, 2017).
2.	Asep Setiawan dan Hamka	Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepada studi kasus	Konsep diplomasi kemanusiaan	Hasil penelitian dari artikel ini menemukan fakta bahwasanya diplomasi di bidang kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terkait penindasan etnis Rohingya merupakan bagian dari pengaplikasian kebijakan luar negeri Indonesia agar dapat menjadi kebijakan yang pro-aktif dalam mempertahankan perdamaian dan ketertiban dunia. Selain itu, dikatakan bahwa dalam menjalankan peran diplomasi kemanusiaannya negara Indonesia mempunyai tujuan sebagai: 1. Untuk mengurangi beban etnis Rohingya agar tidak lagi ada penindasan berkepanjangan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuh dan banyaknya orang yang melakukan pengungsian di perbatasan Bangladesh; 2. Untuk merekomendasikan resolusi politik yang dalam dan menyeluruh di negara Myanmar melalui formula 4+1; 3. Untuk menjalankan mandat undang-undang dalam mempertahankan ketertiban dan perdamaian dunia (Setiawan & Hamka, 2020).
3.	Ahmad Alfajri	Penelitian kualitatif	Konsep demokrasi	Hasil penelitian ini menemukan bahwa demokrasi telah sukses dalam mendesak pemerintahan Indonesia agar dapat berperan demi HAM serta demokrasi itu sendiri. Selain itu juga, hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia memiliki beberapa peran dalam menjalankan bantuannya kepada Rohingya, yakni

				<p>merekomendasikan pemerintahan Myanmar untuk menyelenggarakan rekonsiliasi dalam negeri dan menyetujui OKI untuk menganalisis kasus tersebut, melaksanakan pendekatan ke sejumlah aktor yang berkaitan dengan konflik tersebut, Indonesia juga berfokus pada komunikasi bilateral dan memanfaatkan komunitas multilateral dalam menolong menangani konflik kemanusiaan tersebut. Penulis mengatakan, dilihat dari peran Indonesia tersebut, itu semua mengarah kepada teori demokratis dan terbukti nyata bahwa nilai demokrasi mempunyai dampak yang besar dalam memengaruhi kebijakan Indonesia terkait konflik Rohingya (Alfajri, 2018).</p>
4.	Alrafsya Mahendra Saputra	Penelitian kualitatif	Konsep <i>middle power</i>	<p>Hasil penelitian menemukan Jokowi menyarankan sejumlah rencana bantuan di beberapa, yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan serta bidang mata pencaharian. Di pendidikan, Indonesia mendirikan sekolah untuk etnis Rohingya. Bidang kesehatan, Indonesia mendirikan rumah sakit untuk masyarakat Rakhine terutama etnis Rohingya. Bidang mata pencaharian, Indonesia memanfaatkan rumah sakit yang dibangunnya agar warga lokal Rakhine dapat memperoleh pekerjaan sebagai buruh maupun kontraktor di pembangunan rumah sakit tersebut. Pada bidang ekonomi, Jokowi memberikan bantuan berupa pemberian akses penanam modal asing ke Myanmar terutama dari Indonesia (Saputra, 2020).</p>
5.	Siti Nurlaili Triwahyuni, Fadjrין Wira Perdana, Bambang Setiawan,	Penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan	Konsep diplomasi	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia memakai cara diplomasi dalam menanggapi kasus ini. Pertama, memanfaatkan Pemerintahan sebagai aktor pembangun perdamaian dengan Indonesia melakukan diplomasi untuk</p>

	Irwan dan Yohan Wibisono			mengakrabkan diri dengan Myanmar model diplomasi <i>Government to Government</i> . Yang kedua, aktor diplomasi tak hanya dari negara saja, melainkan indonesia berkolaborasi dengan organisasi untuk menciptakan perdamaian dan memberikan solusi konflik dengan cara diplomasi (Triwahyuni et al., 2021).
6.	Fatma Arya Ardani	Penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif yang mengaitkan sebab dan akibat.	Konsep <i>idiosyncratic</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter SBY yang damai berpengaruh pada kebijakan luar negeri yang dibuatnya. Kebijakan yang SBY buat dalam mengatasi kasus etnis Rohingya beberapa diantaranya ialah melakukan kerja sama dengan organisasi OKI, mengirimkan surat terhadap presiden Myanmar saat itu yaitu Thein Sein, menjadi mediator rapat kasus Rohingya pada KTT ASEAN, memberikan izinnya kepada para pengungsi Rohingya untuk mengungsi di Indonesia, dsb. Jika dilihat kembali dari kebijakan yang diambil SBY tersebut, SBY mempunyai personalitas pemimpin yang konsiliatif yang mana karakter itu dapat berpengaruh pada kebijakan yang dibuat oleh suatu pemimpin (Ardani, 2015).
7.	Novandre Satria dan Ahmad Jamaan	Penelitian kualitatif	Teori konstruktivisme	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Indonesia pada kasus ini adalah sebagai model kepentingan identitas yang mana identitas Indonesia adalah negara dengan warga muslim terbesar di dunia. Kemudian, di tingkat nasional, peran yang diambil Indonesia ini salah satunya karena desakan dari masyarakat Indonesia mengenai diskriminasi muslim Rohingya. Dengan fakta tersebut, warga Indonesia menaruh simpatinya pada penindasan Rohingya. Rakyat Indonesia yang beragama Islam bahkan melakukan gerakan-gerakan salah satunya gerakan demonstrasi.

				Mayoritas dakwaan yang diberikan pada demonstrasi itu adalah mendorong Indonesia agar segera mengambil langkah untuk menanggapi dan melindungi muslim Rohingya. Oleh karena itu, Indonesia kemudian mengambil keputusan untuk menolong etnis Rohingya dengan membuat kebijakan-kebijakannya (Satria & Jamaan, 2013).
--	--	--	--	--

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, adapun beberapa persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh penulis di dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang sekarang. Pada persamaan penelitian sendiri, hal tersebut terletak pada pembahasan mengenai respon Indonesia dalam menangani kasus etnis Rohingya tersebut. Misalnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Alrafsya Saputra, penelitian ini membahas bantuan yang dilakukan Indonesia pada era pemerintah RI pada era Joko Widodo sama seperti yang diteliti oleh penulis. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Asep Setiawan dan juga Hamka membahas terkait peran Indonesia dalam menangani kasus Rohingya yang membedakannya dengan penelitian ini dan penelitian lainnya terdapat pada fokus masing-masing penelitian itu sendiri.

Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menyoroti keaktifan pemerintah RI pada era Joko Widodo dalam menangani kasus etnis Rohingya. Keaktifan itu sendiri akan dideskripsikan melalui bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah RI pada era Joko Widodo terhadap etnis Rohingya dan juga para pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia, Myanmar dan Bangladesh. Penelitian ini juga berupaya untuk memperbanyak penelitian terkait bantuan dari Indonesia kepada Rohingya melalui teori bantuan luar negeri agar para pembaca dapat memperoleh informasi-informasi lebih banyak mengenai hal tersebut. Kemudian, dari beberapa penelitian yang tertera dalam sub-bab ini belum ada yang menggunakan teori bantuan luar negeri itu sendiri.

Selanjutnya penelitian terdahulu ini juga membantu penulis dalam melakukan penelitiannya, karena beberapa informasi yang ada pada penelitian tersebut memuat substansi berkaitan dengan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, melalui penelitian terdahulu ini sendiri penulis memutuskan untuk menganalisis terkait keaktifan bantuan luar negeri yang diberikan pemerintah RI pada era Joko Widodo dengan teori bantuan luar negeri beserta faktor yang melatarbelakangi bantuan-bantuan dari pemerintah RI tersebut. Hal ini dilakukan penulis karena dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, mereka belum menilik lebih lanjut terkait hal tersebut.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dimana etnis Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim di Myanmar yang banyak mengalami penindasan bahkan hingga tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan dari negaranya sendiri akibat sejarah yang mereka miliki. Maka dari itu, beberapa negara menaruh atensinya pada kasus ini, salah satunya Indonesia selaku negara yang bermayoritaskan penduduk muslim dan menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai tempat mengungsi oleh pengungsi Rohingya. Indonesia sendiri sudah sejak lama menyalurkan bantuan luar negerinya, akan tetapi pada pemerintah RI era Joko Widodo, Indonesia dikatakan sebagai pemerintah yang memperlihatkan intensitas aktifnya dalam membantu etnis Rohingya ini sendiri. Sebagaimana hal ini juga, berangkat dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas dimana peneliti akan menyoroti keaktifan yang diberikan oleh pemerintah RI pada era Joko Widodo melalui bantuannya pada Rohingya, sehingga memunculkan rumusan masalah sebagai:

Bagaimana bantuan luar negeri pemerintah RI pada era Joko Widodo yang diberikan kepada etnis Rohingya?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut

1. Mendeskripsikan bantuan luar negeri dari pemerintah RI yang diberikan kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo.
2. Mendeskripsikan alasan pemberian bantuan luar negeri dari pemerintah RI yang diberikan kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian ini dilakukan dengan manfaat sebagai berikut

1. Secara keilmuan

Dengan adanya penelitian ini, secara keilmuan diharapkan penelitian ini:

- a. Dapat memberikan wawasan yang semakin mendalam mengenai konflik etnis Rohingya dengan kaitannya pada studi Hubungan Internasional dan dapat memperkuat teori bantuan luar negeri.
- b. Dapat memberikan pandangan dan informasi terbaru mengenai bantuan luar negeri yang pemerintah RI berikan kepada etnis Rohingya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TEORI BANTUAN LUAR NEGERI

Dikutip dari laman daring Britannica Encyclopedia, Victoria Williams menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan suatu bantuan internasional berupa barang, modal maupun jasa yang diberikan oleh sebuah negara maupun lembaga internasional. Bantuan luar negeri diberikan pada negara penerima guna kepentingan negaranya tersebut. Bentuk dari bantuan luar negeri ini sendiri bermacam-macam, seperti bantuan kemanusiaan, bantuan militer, maupun bantuan ekonomi. Pada bantuan kemanusiaan, hal ini biasanya dilakukan oleh negara pemberi bantuan dalam rangka memberi hibah pada negara lainnya yang tengah mengalami bencana maupun kesulitan, seperti bencana alam, krisis kemanusiaan, dll (Williams, 2021).

Bantuan luar negeri sendiri dimanfaatkan untuk beberapa tujuan pokok, yaitu pembangunan, diplomatik dan bantuan kemanusiaan. Pada tujuan diplomatik, hal ini biasanya mengimplikasikan keamanan seperti keamanan kawasan, nasional dan internasional, pengendalian relasi antar pemerintah dan juga tujuan politik internasional. Terminologi diplomasi umumnya dipakai untuk meliputi seluruh variasi relasi diantara negara-negara, termasuk bantuan, pembangunan, campur tangan kemanusiaan, dll. Bantuan sudah dipakai oleh mayoritas pihak penyalur bantuan untuk memastikan akses kepada aparat pihak penerima bantuan. Kemudian, meningkatnya bantuan kerap kali berperan sebagai tanda kesuksesan suatu kunjungan negara ataupun pertemuan internasional, hal ini mencakup seluruh komponen pada tujuan diplomatik bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri pada tujuan diplomatiknya juga dilakukan negara pemberi bantuan ke suatu pihak atau negara lainnya dikarenakan guna memajukan keamanan negaranya masing-masing. Selain itu, bantuan ini kerap dimanfaatkan oleh sejumlah negara pemberi bantuan guna meraih target diplomatik dari

negaranya masing-masing. Pada hal ini, terdapat kemungkinan negara pemberi bantuan dapat memperoleh pengakuan atau akreditasi diplomatik dari negara penerima bantuan. Kemudian, bantuan luar negeri juga memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai pemerolehan dukungan dan dorongan pada kedudukan sebuah negara di sebuah organisasi internasional serta memperlancar jalan negara pemberi bantuan dalam hal melakukan diplomasi ke beberapa pejabat internasional (Williams, 2021). Dari beberapa penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan bantuan luar negeri pada diplomatik, salah satunya dapat dicontohkan sebagai adanya dialog antara negara maupun pihak pemberi bantuan dengan penerima bantuan, ataupun pengangkatan topik sebuah kasus di dalam forum internasional yang melibatkan beberapa negara di dalamnya, atau juga dapat berbentuk diskusi, rapat serta konferensi antar beberapa negara. Pada intinya bantuan diplomatik itu melibatkan negara lainnya di dalamnya.

Kemudian, pada tujuan pembangunan dalam bantuan luar negeri, hal ini sendiri mendorong adanya pertumbuhan sosial dan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan yang mana hal-hal tersebut tidak hanya menjadi tujuan kebijakan saja melainkan menjadi instrumen dari bantuan luar negeri juga. Selanjutnya, sepanjang hadirnya perang dingin ataupun perang menentang terorisme, bantuan dengan tujuan pembangunan ini sudah ditafsirkan sebagai langkah untuk menahan ketidakpuasan sosial yang bisa menguatkan pengaruh kaum komunis. Selain itu, tujuan akhir dari pembangunan ini sendiri adalah untuk memperkenalkan pembangunan itu sendiri, yang mana hal ini dapat membenahi kehidupan para penduduk yang kurang baik di luar negeri, dapat dijadikan pula sebagai gambaran dari nilai altruisme, keadilan sosial serta kesetiakawanan dunia internasional (Lancaster, 2007). Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai ajang bagi negara pemberi bantuan untuk memajukan pembangunan ekonomi negara yang terkena musibah serta untuk menanggulangi sejumlah kasus transnasional yang mencakup terorisme, kekerasan, penghancuran lingkungan, dll (Williams, 2021). Tujuan pembangunan ini sendiri mengarah pada tujuan pembangunan dalam jangka waktu yang lama

(Morgenstern & Brown, 2022). Kemudian, pada tujuan pembangunan ini, penulis mengambil contoh yang ada di topik penelitiannya sebagai salah satu bentuk tujuan bantuan luar negeri pada pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh negara pemberi bantuan di kawasan negara penerima bantuan. Pembangunan infrastruktur ini sendiri umumnya dilakukan negara pemberi bantuan untuk mengurangi penderitaan warga dan korban penerima bantuan.

Selanjutnya, terdapat bantuan luar negeri dalam tujuannya untuk bantuan kemanusiaan. Bencana alam maupun bencana buatan manusia kerap menyebabkan banyaknya korban berjatuhan, terkadang pula menyebabkan adanya imigran dalam negeri maupun imigran yang bermigrasi ke luar negeri. Pihak negara terbelakang kerap pula kurang terpenuhi sumber dayanya ataupun kapabilitas dalam memenuhi keperluan korban yang mengalami bencana tersebut. Pada hal ini sendiri, umumnya lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi pada perbaikan dan pembenahan akan menyalurkan bantuannya. Mayoritas bantuan-bantuan tersebut difasilitasi oleh sejumlah negara yang merasa mampu untuk menyalurkan bantuan. Seluruh tujuan bantuan di atas juga kerap kali berhubungan antar satu dengan yang lainnya (Lancaster, 2007). Selain itu juga, adanya kepedulian dalam hal kemanusiaan dapat menggerakkan suatu pihak dalam menyalurkan bantuannya dalam periode waktu yang singkat, yang mana hal ini merupakan sebuah tanggapan terkait konflik maupun bencana yang hadir. Kemudian, hal ini juga dapat menggerakkan adanya bantuan dalam periode waktu yang lama, yang mana bantuan ini mempunyai tujuan untuk dapat melawan wabah penyakit, meminimalisir kemiskinan, serta jenis kemalangan lainnya yang diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan sistemik. Kepedulian ataupun keprihatinan pada kemanusiaan ini sendiri pada umumnya telah menjadi faktor dari pemberian bantuan (Morgenstern & Brown, 2022). Penulis sendiri mengambil contoh tujuan bantuan luar negeri pada kemanusiaan melalui penjelasan di atas, yaitu adanya pengiriman bantuan kebutuhan pokok untuk para korban penerima bantuan seperti pengiriman bantuan makanan, baju,

medis maupun layanan kesehatan. Hal ini sendiri dilakukan untuk menunjang hidup para korban bencana.

PBB bahkan mengatakan bahwa organisasi tersebut mewajibkan seluruh negara maju agar dapat memberikan sekiranya 0.7 persen dari pendapatan nasional bruto negara maju tersebut untuk dikirimkan menjadi bantuan asing. Pemerintahan sebuah negara pemberi bantuan diperbolehkan untuk bisa membentuk perjanjian dengan negara penerima bantuan, dimana ini termasuk ke dalam kepentingan nasional sebuah negara yang ingin mereka capai (Kenton, 2021).

Bantuan luar negeri atau yang dapat dikatakan sebagai bantuan asing, bukan merupakan bentuk teori yang baru. Koloni merupakan pihak yang menerima bantuan internasional berbentuk militer, khususnya dari negara Prancis pada saat Revolusi Amerika. Semasa Perang Dunia I, pemerintahan Amerika Serikat memberikan peminjaman Committee for Relief pada Belgia sebesar 387 Juta Dollar, yang selanjutnya banyak orang yang dibebaskan dari keterikatan perang ini (Kenton, 2021). Kemudian, pada masa setelah adanya Perang Dingin, bantuan internasional menyatukan aspek kemanusiaan dengan aktivitas pada bidang politik, hal tersebut dapat ditafsirkan juga sebagai dasar politik humaniora. Campuran dari kemanusiaan tersebut dibatasi dengan prinsip non intervensi pada persoalan dalam negeri di suatu negara yang berkuasa. Pada pasca tahun 1991, bantuan luar negeri sendiri sudah dijadikan sebagai metode pendekatan intervensionis di dalam hubungan internasional. Bantuan luar negeri biasanya dilandaskan atas beberapa hal, diantaranya yaitu keperluan pada kebijakan ataupun politik luar negeri pada sejumlah negara pemberi bantuan, hal-hal yang terdapat di dalam aktivitas kemanusiaan, serta keikutsertaan beberapa lembaga bantuan dengan yuridiksi pada bidang politik ketika sebuah negara sedang mengalami krisis. Keperluan kebijakan luar negeri sebuah negara pemberi bantuan sendiri bermacam-macam, baik untuk memperoleh akses pada sumber daya yang dimiliki negara penerima bantuan, maupun untuk meminimalisir total pengungsi yang pergi dari area krisis. Seluruh pihak pemberi bantuan wajib melakukan negosiasi mengenai

beberapa hal seperti penerimaan bantuan luar negeri tersebut dan penyebaran bantuan dengan pemerintah negara ataupun pihak terkait, hal ini dilakukan guna memastikan kalau bantuan yang dikirimkan sudah sesuai dengan keperluan pihak penerima dan bantuan tersebut sampai dengan selamat di tangan orang-orang yang membutuhkannya (Zhukova, 2020).

Lembaga bantuan yang mengurus terkait bantuan luar negeri perlu mendiskusikan terkait penyaluran bantuan dan warga yang menerima bantuan-bantuan tersebut melalui kekuasaan politik yang ada pada negara penerima bantuan. Hal ini sendiri dilakukan agar dapat menentukan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh para penerima bantuan dengan berlandaskan atas keperluan mereka, tanpa melihat kelompok konflik mereka berasal (Macrae, Joanna; Leader, 2000). Kemudian, bantuan luar negeri ini juga berasaskan pada ketakberpihakan dan kenetralan suatu pihak penyalur bantuan yang mana ini bermaksud agar bantuan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menjadi senjata konflik oleh kelompok-kelompok yang bermasalah dengan menghadang atau menyabotase bantuan maupun memperkaya pihak yang berdaulat melalui suap (Dunn, 2012).

Bantuan luar negeri ini juga amat diplomatis dengan hubungan eratnya bersama dengan kemanusiaan, keamanan dan pembangunan. Pada hal ini, batasan antara kemanusiaan dengan integritas politik seperti keamanan dan pembangunan tidak akan berlaku (Lewis, 2016). Situasi genting pada negara konflik bisa bertumbuh menjadi krisis kemanusiaan yang serius. Selain itu, konflik bersenjata bisa bertumbuh menjadi kegiatan militer yang berkepanjangan. Kedua hal tersebut memerlukan resolusi dalam periode waktu yang lama, yang mana dapat menjadikan suatu bantuan kemanusiaan menjadi bantuan pembangunan (Atlani-Duault & Dozon, 2011).

Ada pula beberapa kelompok yang mempunyai opininya tersendiri terkait bantuan. Menurut kaum realis, bantuan merupakan instrumen untuk memajukan keamanan nasional dan kekuatan. Kemudian, George Liska yang merupakan bagian dari kaum realis menambahkan bahwasanya bantuan luar negeri merupakan alat kekuatan politik. Lalu, pada saat itulah

banyak dari pada cendikiawan melakukan pengkajian pada konteks tujuan suatu bantuan diberikan. Pada hasil akhir kajian ini sendiri memunculkan lebih banyak dukungan dalam dugaan atau opini yang dikatakan oleh kaum realis, dimana pemberian bantuan yang melibatkan 2 pihak secara krusial dijalankan melalui kepentingan pribadi mereka. Selanjutnya, kaum marxis, teori *dependency* serta postmodernisme mempunyai ideologi atau pemahaman yang beda terkait bantuan luar negeri. Mereka berpendapat bahwa bantuan luar negeri merupakan instrumen negara dominan pada inti kapitalisme dunia dalam menolong mereka untuk mengendalikan dan memanfaatkan sejumlah negara berkembang. Contohnya adalah ketika bantuan luar negeri diberikan kepada suatu negara, mereka menghubungkan bantuan tersebut dengan kegiatan ekspor jasa dan barang dari negara pemberi bantuan (Lancaster, 2007).

Kemudian, kaum liberal internasionalis dengan kaum liberal lainnya pada hubungan internasional memandang bantuan luar negeri sebagai suatu alat ataupun cerminan dari tendensi sebuah negara melakukan kerja sama untuk menangani konflik globalisasi dan saling ketergantungan. Pada hal ini sendiri, bantuan-bantuan tersebut diberikan melalui organisasi internasional dan dimanfaatkan untuk menangani penularan virus atau penyakit di penjuru dunia atau dimanfaatkan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Selanjutnya, teori konstruktivisme juga memiliki pandangannya tersendiri terkait bantuan luar negeri, dimana pada pandangan ini terdapat kemungkinan untuk mendapatkan informasi terbaru dalam kawasan hubungan internasional. Mereka mengatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan ungkapan norma yang berada di dalam relasi antar negara-negara, sebagaimana negara maju perlu menyalurkan bantuannya terhadap negara terbelakang guna menolong negara terbelakang itu agar kualitas hidup warga negaranya dapat termajukan. Hal ini sendiri didukung dengan pernyataan seorang penulis, yaitu David Lumsdaine yang mengatakan bahwa bantuan luar negeri tidak bisa dideskripsikan melalui kepentingan ekonomi ataupun politik. Melainkan, bantuan adalah respon suatu pihak terkait keterbelakangan dunia yang hadir dari kepedulian dan

kemanusiaan serta kepercayaan pada kemakmuran dan perdamaian yang hanya dapat terwujud pada sistem internasional yang adil dan baik (Lancaster, 2007).

Dari seluruh teori yang berbeda-beda tersebut, tidak ada yang dapat mendeskripsikan bantuan luar negeri dengan jelas. Mereka tidak mempunyai elemen yang penting di dalamnya, seperti imbas politik dalam negeri terkait penyaluran bantuan. Bantuan luar negeri adalah suatu pengeluaran nasional dalam jumlah yang substansial dan berkelanjutan. Maka dari itu, bantuan tersebut harus dimonitor oleh sejumlah komponen negara penyalur bantuan baik dari badan eksekutif maupun legislatif negara. Seluruh komponen itu sendiri kerap kali memengaruhi tujuan dari pemberian bantuan. Kemudian, pemerintah negara penyalur bantuan juga perlu membentuk aliansi dukungan dalam bantuan luar negeri pada publik dan badan legislatif guna menjaga pengeluaran bantuan. Faktor yang akan muncul pada aliansi ini sendiri nantinya adalah mereka akan menginginkan aktivitas politik mereka tergambar pada rancangan bantuan. Dampak dari hal tersebut sendiri membuat tujuan pemberian bantuan kerap kali menjadi hasil dari hal-hal yang hadir di dalam dan di luar perbatasan negara pemberi bantuan tersebut (Lancaster, 2007).

Bantuan luar negeri ini sendiri diawali sebagai media diplomasi sementara pada Perang Dingin. Namun, lambat laun bantuan berubah menjadi suatu hal yang umum dan dibutuhkan pada relasi antar negara maju dengan negara terbelakang. Hal ini sendiri menggambarkan terkait perubahan norma internasional terkait bantuan luar negeri, dimana pihak negara maju perlu memfasilitasi sumber daya umum untuk memulihkan keadaan orang-orang di negara terbelakang tersebut. Perubahan tersebut bertumbuh secara signifikan sebab adanya politik dalam negeri pada negara penyalur bantuan yang mana terdapat kewajiban untuk memberikan penyaluran bantuan per tahunnya dan hadirnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang konstruksi yang membentuk komponen lokal yang bertujuan untuk ekspansi bantuan (Lancaster, 2007).

Bantuan luar negeri merupakan sebuah teori yang kompleks. Terkadang bantuan ini ditafsirkan menjadi kebijakan, namun bantuan bukanlah kebijakan melainkan instrumen kebijakan. Terkadang juga ditafsirkan menjadi pengeluaran perniagaan dan militer. Akan tetapi, bantuan luar negeri itu sendiri merupakan penyaluran sumber daya publik secara sukarela dari suatu pihak pemerintah ke pemerintah yang lainnya, lembaga internasional maupun lembaga swadaya masyarakat. Pengertian bantuan luar negeri di atas tersebut serupa dengan pengertian yang dipakai oleh *Development Assistance Committee (DAC)* dari *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* untuk mengartikan bantuan pembangunan resmi melalui perbedaan yang signifikan dimana bantuan tersebut hanya mengimplikasikan penyaluran bantuan terhadap negara yang mempunyai pendapatan kecil. Bantuan luar negeri sendiri mengarah pada penyaluran antar suatu negara merdeka dan negara lainnya (Lancaster, 2007).

Kemudian, bantuan bisa berbentuk uang tunai seperti pinjaman ataupun donasi dan berupa natura seperti bantuan makanan ataupun dispensasi utang. Penyaluran bantuan tersebut bisa membiayai beberapa program seperti neraca pembayaran maupun keperluan dana yang ada pada negara penerima bantuan, proyek pembaharuan politik dan ekonomi dan bantuan kemanusiaan. Bantuan juga memperbolehkan pihak penerima bantuan dalam memajukan program yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dari suatu bantuan. Contohnya seperti menyalurkan bantuan terhadap warga negara yang mengalami musibah. Selain itu, bantuan yang muncul dari lembaga internasional ataupun negara yang berkuasa melambangkan isyarat politik yang unggul. Selanjutnya, jika total bantuan yang dikirimkan dari suatu pihak mengalami peningkatan, maka hal tersebut kerap kali melambangkan adanya kemajuan pendekatan pada relasi antar pihak penerima bantuan dengan penyalur bantuan dan begitupun sebaliknya, apabila total bantuan yang dikirimkan menurun, maka hal tersebut kerap kali melambangkan suatu relasi yang acuh dan tidak baik (Lancaster, 2007).

Bantuan juga bisa berorientasi menjadi suatu sinyal terhadap pemerintah atau pihak lain yang menandakan bahwasanya pihak pemberi bantuan bersedia untuk berdiri di balik pihak penerima bantuan dalam permasalahan yang dialaminya. Bantuan luar negeri juga kerap kali melaksanakan sejumlah peran secara bersamaan (Lancaster, 2007).

Bantuan luar negeri juga bertambah sering digunakan oleh beberapa pihak dalam rangka meminimalisir perselisihan serta mengendalikan peralihan situasi setelah adanya suatu perselisihan, terutama dalam menolong pihak negara untuk mendapatkan rehabilitasi dari perang dengan adanya mediasi, pendirian kembali lembaga politik dan juga relasi sosial antar kelompok serta pemberantasan ranjau di negara yang mengalami perselisihan (Lancaster, 2007).

Bantuan luar negeri mempunyai manfaat tersendiri bagi pihak penyalur dan penerima bantuan, diantaranya (Regoli, 2019):

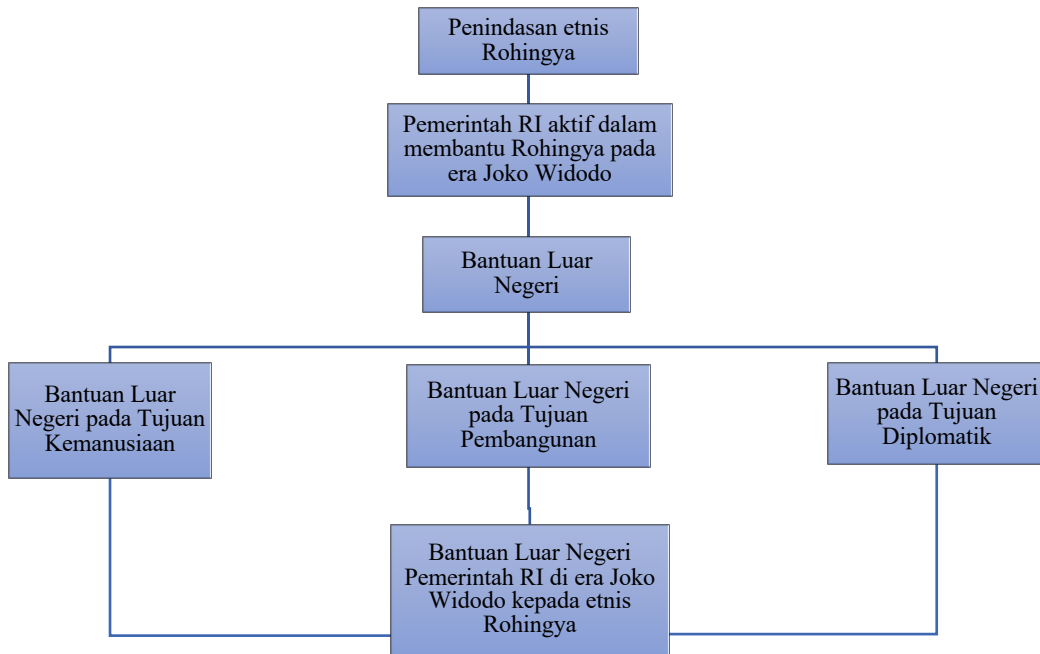
- Bantuan luar negeri dapat menghadirkan relasi yang semakin kokoh untuk seluruh pihak yang terlibat pada hal ini.
- Bantuan luar negeri bisa meminimalisir adanya kemiskinan.
- Bantuan luar negeri dapat memberikan probabilitas ekonomi untuk pihak penerima bantuan dan penyalur bantuan.
- Bantuan luar negeri dapat menolong suatu pihak tanpa perlu mengintervensi pihak tersebut.
- Bantuan luar negeri dapat menghadirkan adanya hubungan timbal balik.
- Bantuan luar negeri bisa melindungi banyak individu.

Penggunaan teori ini pada penelitian sendiri dapat membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori ini juga dapat mendeskripsikan pengertian dari bantuan luar negeri dan juga mendeskripsikan baik terkait bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap Rohingya maupun analisis dari bantuan-bantuan luar negeri Indonesia tersebut. Pada penganalisisan tersebut peneliti akan dibantu melalui hadirnya faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pemberian bantuan tersebut. Pada faktor internal sendiri hal

tersebut dipengaruhi karena adanya aspek keamanan dan kepentingan nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan, pada faktor eksternal hal tersebut dipengaruhi oleh seluruh situasi yang hadir di luar negeri. Selain itu, melalui teori bantuan luar negeri ini penulis akan menjelaskan topik penelitiannya melalui kategori tujuan bantuan luar negerinya seperti yang termuat di atas tersebut.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yaitu adanya kekerasan serta penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya dan juga dengan terdapatnya fakta bahwa pemerintah RI berperan aktif dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Rohingya, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bantuan luar negeri dari pemerintah RI tersebut dengan menggunakan bantuan dari teori bantuan luar negeri yang meliputi atas tujuan bantuan luar negeri pada kemanusiaan, pembangunan dan politik yang menghasilkan bantuan luar negeri pemerintah RI pada era Joko Widodo terhadap etnis Rohingya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini menghasilkan kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

(Sumber: diolah oleh peneliti)

III. METODE PENELITIAN

3.1 TIPE PENELITIAN

Tipe metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri mempunyai definisi yakni suatu pendekatan penelitian yang pada dasarnya cenderung menargetkan penelitiannya dalam kata-kata daripada angka maupun kuantifikasi pada penganalisisannya/penelitiannya dan juga pada pengumpulan datanya. Metode penelitian kualitatif ini umumnya menggunakan detail yang deskriptif dalam memberikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan (Bryman, 2012).

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan sebuah peristiwa yang sedang terjadi khususnya di topik penelitian penulis secara jelas dan detail serta penulis juga ingin memahami lebih lanjut mengenai peristiwa yang tengah berlangsung tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu, penulis ingin mendeskripsikan peristiwa secara objektif, cermat dan juga logis. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang muncul.

3.2 FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan banyak topik di dalamnya baik dari pendeskripsian permasalahan penelitian hingga penganalisisan bahasan inti permasalahan itu sendiri, maka dari itu penting bagi penelitian ini untuk memuat fokus penelitian, yakni melakukan pendeskripsian mengenai

bantuan luar negeri yang diberikan pemerintah RI kepada etnis Rohingya terkait penindasan, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh etnis tersebut dengan batasan waktu pada periode pertama era Joko Widodo, yakni dari tahun 2014 hingga 2019. Selain itu juga, penelitian ini akan berfokus pada teori bantuan luar negeri yang mencakup atas tujuan bantuan luar negeri, yaitu kemanusiaan, pembangunan, dan diplomatik.

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini sendiri adalah data sekunder. Data sekunder sendiri mempunyai definisi sebagai data yang didapatkan dari penelitian terdahulu dan yang melakukan penganalisisan umumnya adalah orang lain atau peneliti terdahulu yang telah lebih dahulu melakukan penelitian terkait sebuah topik (Bryman, 2012).

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini melalui triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan pemanfaatan lebih dari satu sumber data dalam menganalisis suatu peristiwa. Triangulasi ini sendiri mengacu pada beberapa sumber data yang fokusnya mengarah pada metode analisis dan sumber data (Bryman, 2012). Pada penelitian ini triangulasi sumber data itu sendiri berasal dari beberapa laman daring diantaranya:

1. Sumber triangulasi pertama yang terdapat di dalam penelitian ini sendiri berasal dari laman portal berita daring, yaitu Deutsche Welle. Pada artikel ini dijelaskan bahwa Indonesia menyalurkan bantuannya terhadap warga etnis Rohingya yang mana dapat di akses melalui <https://www.dw.com/id/indonesia-kirimkan-bantuan-buat-rohingya/a-36939005>. Singkatnya, artikel ini menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah RI terhadap etnis Rohingya berisikan atas baju, makanan bayi dan makanan instan. Kemudian, beberapa bantuan itu sendiri dikirimkan kepada etnis Rohingya sesudah adanya dialog antara

pihak negara Myanmar dan menuju Indonesia (Deutsche Welle, 2016).

2. Selanjutnya, sumber triangulasi data yang kedua ditulis oleh penulis Heru Purwanto yang dapat diakses melalui <https://en.antaranews.com/news/108653/indonesia-dispatches-delivery-of->. Artikel ini sendiri membahas terkait pengiriman bantuan yang ada pada sumber triangulasi sebelumnya yang mana bantuan itu sendiri disalurkan langsung dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta. Tidak hanya itu, Joko Widodo selaku pemimpin negara Indonesia bahkan turut hadir dalam kegiatan pemberangkatan sejumlah bantuan dari pemerintah RI tersebut. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapannya, yaitu beliau sangat mengharapkan agar warga minoritas etnis Rohingya yang berada di kawasan Rakhine bisa mendapatkan ketenteraman melalui beragam usaha yang sudah dan akan dilanjutkan terus-menerus oleh Indonesia kepada etnis Rohingya (Purwanto, 2016).
3. Sumber triangulasi data yang ketiga berasal dari laman portal berita daring, yaitu Deutsche Welle. Artikel ini sendiri dapat diakses melalui <https://www.dw.com/id/indonesia-kirim-bantuan-tahap-pertama-untuk-rohingya/a-40483431>. Pada artikel ini membahas terkait bantuan lainnya yang dikirimkan oleh pemerintah RI. Bantuan-bantuan itu sendiri disalurkan oleh Indonesia dengan cara bertahap. Kemudian, informasi yang dimuat pada artikel tersebut merupakan bantuan gelombang pertama untuk pengungsi Rohingya yang berada di perbatasan negara Bangladesh dan negara Myanmar. Sejumlah bantuan itu sendiri berupa makanan instan, selimut, beras, family kit, baju anak-anak, barak pengungsi dan juga bak air yang dikirimkan melalui 4 pesawat Hercules Indonesia. Kemudian, di artikel ini juga dikatakan bahwa Indonesia kembali menegaskan

komitmennya dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya (Deutsche Welle, 2017).

4. Sumber triangulasi data yang keempat berasal dari laman web resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Artikel ini sendiri dapat di akses melalui <https://setkab.go.id/en/indonesian-govt-continues-to-send-humanitarian-aid-for-rohingya/>. Artikel ini membahas terkait bantuan lanjutan dari bantuan gelombang pertama yang dikirimkan oleh pemerintah RI ke Rohingya. Artikel ini juga menyampaikan bahwa Indonesia memperlihatkan responsibilitasnya dalam memberikan bantuan kepada sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di Rakhine, Myanmar. Bantuan itu sendiri disalurkan melalui pengiriman 2 pesawat Herculesnya yang mengangkut bantuan-bantuan kemanusiaan pemerintah RI berupa sarung, makanan instan, pakaian seperti sarung, makanan khusus untuk ibu hamil serta bayi dan sebagainya. Kemudian, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengirimkan bantuan lainnya seperti obat medis bertotalkan satu ton untuk sejumlah pengungsi Rohingya (Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, 2017).

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pada teknik pengumpulan data, penulis akan menggunakan teknik dokumentasi kualitatif. Pengumpulan data ini umumnya dilakukan oleh para peneliti dengan menyelam lebih dalam pada beberapa dokumen tertulis yang didapatkannya. Dokumen-dokumen tersebut mencakup dokumen terbuka/publik, seperti hasil rapat, surat kabar dan majalah, laman resmi, undang-undang, peraturan, dan juga laporan resmi. Selain itu terdapat pula dokumen tertutup/pribadi, seperti buku harian, jurnal pribadi, surat maupun

email (Cresswell & Cresswell, 2018). Pada penelitian ini sendiri penulis mengumpulkan data dokumen dengan melalui hasil rapat, laporan resmi dari sejumlah lembaga negara maupun laman resmi, berita, majalah dan surat kabar, undang-undang serta peraturan negara maupun non negara, artikel-artikel daring, serta hasil rapat dari sejumlah organisasi internasional dan juga negara.

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Terdapat tiga tahapan dalam melakukan teknik analisis data, yaitu kondensasi data, tampilan data dan terakhir penarikan kesimpulan atau pemverifikasian (Miles et al., 2014).

3.5.1 Kondensasi Data

Kondensasi data atau yang dapat juga disebut sebagai pemadatan data, ini mengarah pada prosedur penentuan, pengkonsentrasian, simplifikasi, pengabstrakan dan juga proses transfer sebuah data yang hadir pada sebuah catatan tertulis yang timbul pada saat di lapangan atau saat penelitian, skrip wawancara, dokumen, serta data nyata yang lain. Melalui kondensasi, diyakini dapat menjadikan suatu data menjadi lebih kokoh. Kondensasi data sendiri merupakan sebuah model analisis yang dapat mengasah, menyeleksi, mengkonsentrasikan, menghapus serta menyusun data menjadi sebaik mungkin sampai dapat divalidasi/verifikasi dan diambil kesimpulan akhir (Miles et al., 2014).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tekni kondensasi data, dimana penulis telah melakukan penyeleksian terlebih dahulu mengenai data mana yang akan diambil dan mana yang tidak perlu diambil. Setelah itu, penulis akan melakukan pengkonsentrasian mengenai topik yang akan

diteliti yakni mengenai bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah RI kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo. Lalu, penulis akan menghapus data-data yang dirasa kurang sesuai dengan pengkonsentrasian tersebut dan selanjutnya penulis akan menyusun data-data yang telah di analisis untuk ditulis di dalam penelitiannya agar lebih berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

3.5.2 Tampilan Data

Pada dasarnya, tampilan merupakan sekelompok informasi yang tersusun dan tersederhanakan yang nantinya dapat dilakukan untuk mengambil kesimpulan dan respons. Tampilan data yang bagus dan baik merupakan kunci utama pada teknik analisis data kualitatif yang kokoh. Tampilan direncanakan agar dapat memperoleh informasi yang tersusun secara lebih sederhana serta dapat digunakan secepatnya sehingga penganalisisan dapat menyimpulkan mengenai hal yang sedang dialami dan dapat mengambil kesimpulan yang dirasa perlu direvisi ataupun meneruskan ke tahapan analisis selanjutnya. Merencanakan tampilan dengan menentukan data kualitatif mana yang akan dipakai dan jenis data kualitatif apa yang perlu dipakai merupakan bagian dari analisis. Tampilan yang cenderung terorganisir dan kokoh dapat membuat analisis semakin baik (Miles et al., 2014).

Pada penelitian ini, penulis menentukan jenis data apa yang perlu dimasukkan ke dalam penelitian ini dengan segala pertimbangan seperti data mana yang lebih efektif dan akurat untuk dipakai, setelah menentukan hal tersebut barulah peneliti memasukkan data yang dirasa cocok pada penelitian ini. Selain itu juga, pada tahap menganalisis data, dari banyaknya data yang telah dianalisis oleh penulis, penulis hanya memasukkan data yang sesuai dengan topik penelitian karena dari semua data yang telah diperoleh penulis tidak seluruhnya bisa masuk ke dalam penelitian.

Pada tampilan data ini juga, penulis menampilkan beberapa datanya berupa teks naratif, tabel, gambar infografis dan grafik bagan.

3.5.3 Pengambilan dan Pemvalidasian Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan yang baik harus dapat menjaga keterbukaan mengenai pendapat dan dapat kritis pada penelitiannya, namun demikian penulis tetap dapat mengambil kesimpulan dari penelitiannya. Mungkin pada awalnya suatu kesimpulan tersebut belum jelas terlihat, namun lambat laun akan semakin jelas dan semakin logis. Tahap selanjutnya pada pengambilan kesimpulan ini adalah pemvalidasian. Peneliti perlu memvalidasi kembali dengan mengecek kembali catatan tertulis yang terdapat di dalam lapangan atau penelitian. Hal-hal yang hadir melalui data perlu dicek kembali keakuratan dan kelogisannya agar pemvalidasian tersebut muncul (Miles et al., 2014).

Pada hal ini, penulis setelah mengambil kesimpulannya dari data-data yang telah dianalisisnya akan mengecek kembali keakuratan dan kelogisan data-data tersebut agar validitas data pada analisis dapat terbukti adanya dan data tersebut tidak hanya data asal yang dipakai oleh penulis akan tetapi kebenarannya pun dapat diakui oleh penulis.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya telah membawanya ke dalam banyak keprihatinan yang membuat beberapa pihak ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuannya kepada etnis ini. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang membantu etnis Rohingya melalui bantuan luar negerinya. Bantuan luar negeri sendiri merupakan bantuan internasional yang disalurkan oleh suatu negara maupun lembaga internasional. Pemberian bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sendiri mencakup atas tujuan dari bantuan luar negeri yang diberikan, diantaranya bantuan pada tujuan kemanusiaan, bantuan pada tujuan pembangunan dan bantuan pada tujuan diplomatik. Ketiga bantuan tersebut diberikan Indonesia kepada etnis Rohingya maupun pengungsi-pengungsi Rohingya yang berada di negaranya dan negara lainnya seperti Bangladesh dan Indonesia itu sendiri.

Pada bantuan luar negeri di tujuan kemanusiaan, pemerintah RI mengirimkan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada etnis dan pengungsi Rohingya, seperti makanan, tenda pengungsi, obat-obatan, pakaian, dll. Kemudian, pada bantuan luar negeri yang bertujuan pembangunan, hal ini dilakukan agar dapat membantu kehidupan para warga negara yang kurang baik atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Pada bantuan ini, pemerintah Indonesia membangun beberapa sekolah di kawasan Rakhine, Myanmar agar pelajar-pelajar Rohingya dapat melanjutkan pendidikannya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga turut membangun rumah sakit di Rakhine yang mana beberapa warga Rohingya juga diperbolehkan untuk bekerja di rumah sakit ini. Terakhir, bantuan luar negeri yang bertujuan diplomatik, bantuan ini sendiri berhubungan dengan relasi antar negara. Pada bantuan ini sendiri, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan, diskusi, ataupun dialog

dengan negara-negara lain seperti dengan Myanmar, Bangladesh dan sebagainya yang membahas terkait permasalahan etnis Rohingya ataupun pengungsi Rohingya. Indonesia juga turut membawa topik permasalahan Rohingya ini pada suatu forum dan turut mengajak negara lainnya untuk membantu etnis tersebut.

Pemberian bantuan dari Indonesia tersebut diberikan kepada etnis Rohingya secara tahun ke tahunnya dari tahun 2014 hingga 2019, tanpa terkecuali. Pemberian bantuan-bantuan ini juga telah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat etnis Rohingya. Pada beberapa kesempatan, Indonesia sendiri telah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Myanmar terkait bantuan apa saja yang mereka butuhkan.

5.2 SARAN

Indonesia dalam memberikan kebijakannya terkait bantuan luar negeri kepada Rohingya diharapkan juga dapat semakin mendorong Myanmar untuk mencari titik terang dari konflik yang terjadi pada etnis Rohingya ini. Konflik ini sendiri telah berlangsung sangat lama yang mana perlu jalan keluar agar penindasan pada masyarakat etnis Rohingya tidak semakin berlarut-larut. Apabila, konflik ini berlanjut semakin lama, hal tersebut dapat berdampak pada kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Selain itu juga, Indonesia diharapkan untuk tidak terlalu memaksakan bantuannya untuk Rohingya, sebagaimana itu terjadi pada kasus pengungsi Rohingya di tahun 2015 dimana sudah banyak pengungsi yang berada di Indonesia, namun Indonesia tetap menerima pengungsi Rohingya yang datang.

Indonesia juga harus lebih tegas terhadap peraturan yang dibuatnya dalam penerimaan pengungsi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia tidak kembali melanggar peraturan yang ada dengan menerima pengungsi secara sepihak. Indonesia juga harus lebih tegas lagi dalam urusan pengungsi Rohingya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak

diinginkan kembali terjadi, seperti adanya penjualan narkoba yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, M. Z. Bin, & Baihaqie, A. (2017). the Influence of Islam in Indonesian Foreign Policy: Case Study on Rohingya Conflict. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(1), 96. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1476>
- Alam, I. F., & Purwanto, A. J. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019. *Kajian Hubungan Internasional*, 1(1).
- Alfajri, A. (2018). *Democracy and Indonesia's Foreign Policy (Case Study: Rohingya Crisis 2012-2017)*. 129(Icsps 2017), 66–69. <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.15>
- Ardani, F. A. (2015). Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono). *Journal of International Relations*, 1(2), 22–28. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi%0Ahttp://www.fisip.undip.ac.id>
- Atlani-Duault, L., & Dozon, J. P. (2011). Colonization, Development, Humanitarian Aid: Towards a Political Anthrhopology of International Aid. *Ethnologie Francaise*, 41(3), 393–403. <https://doi.org/10.3917/ethn.113.0393>
- Azizah, I. N. (2017). Peranan Indonesia Dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya Di Myanmar (2014-2017). *Global Political Studies Journal*, 1(2), 162–180. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v1i2.2022>
- BBC News Indonesia. (2017a, September 3). *Presiden Jokowi meminta pemerintah Myanmar "hentikan dan cegah kekerasan."* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>
- BBC News Indonesia. (2017b, September 18). Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh "mulai dibagikan hari ini." *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41302028>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th Editio). Oxford University Press.
- Chan, E. (2022). *Rohingya People*. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Rohingya>
- Chickera, A. de. (2021). *Stateless and Persecuted: What Next for the Rohingya?* Migration Policy Institute. <https://www.migrationpolicy.org/article/stateless-persecuted-rohingya>
- Cresswell, J. W., & Cresswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). SAGE.
- Deutsche Welle. (2016, December 29). Indonesia Kirimkan Bantuan buat Rohingya. *Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/indonesia-kirimkan-bantuan-buat-rohingya/a-36939005>
- Deutsche Welle. (2017, September 13). Indonesia Kirim Bantuan untuk Rohingya. *Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/indonesia-kirim-bantuan-tahap-pertama-untuk-rohingya/a-40483431>
- Dewi, L. M. (2022). *Krisis Pendidikan Pengungsi: Upaya Unicef dalam Penyebaran Norma Hak Memperoleh Pendidikan Terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh (Tahun 2017-2020)*.

- Djumati, N. Y., Lengkong, J. P., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar. *Jurnal Politico*, 8(4).
- Driss, B. (2012). Rohingya Minority in Myanmar Between the Religious Persecution and the Reality of Constitutional Protection. *Brawijaya Law Journal*, 3(2), 221–241.
- Dunn, E. C. (2012). The Chaos of Humanitarian Aid: Adhocracy in the Republic of Georgia. *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.1353/hum.2012.0005>
- Embassy of The Republic of Indonesia in Washington D.C. The United States of America. (2018). *Indonesia's Foreign Policy*. Kemlu.Go.Id. https://kemlu.go.id/washington/en/pages/kebijakan_luar_negeri_ri/716/etc-menu
- Faye, M. (2021). A forced migration from Myanmar to Bangladesh and beyond: humanitarian response to Rohingya refugee crisis. *Journal of International Humanitarian Action*, 6(13). <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00098-4>
- Febriani, A. R. (2022, December 28). Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya? Begini Sejarahnya. *Detik Edu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6485435/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-begini-sejarahnya>
- Gerin, R. (2017, February 23). Humanitarian Aid From Malaysia Arrives in Myanmar's Troubled Rakhine State. *Radio Free Asia*. <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/humanitarian-aid-from-malaysia-arrives-in-myanmars-troubled-rakhine-state-02222017151758.html>
- Gischa, S. (2022, March 29). Mengenal Asal Usul Etnis Rohingya. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/29/133000269/mengenal-asal-usul-etnis-rohingya?page=all>
- IPAC. (2018). *Indonesia and the Rohingya Crisis* (Issue 46). http://file.understandingconflict.org/file/2018/06/IPAC_Report_46.pdf
- Iswara, A. J. (2022, March 22). Siapa Rohingya dan Sejarah di Myanmar. *Kompas.Com*. <https://internasional.kompas.com/read/2022/03/22/123000470/siapa-rohingya-dan-sejarah-di-myanmar?page=all>
- Ivon. (2017). *Pemerintah Terus Kirim Bantuan Untuk Pengungsi Rohingya*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10726/pemerintah-terus-kirim-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya/0/berita>
- JDIH DPR RI. (n.d.). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Dpr.Go.Id.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar. (2018). *Hubungan Bilateral Indonesia - Myanmar*. Kemlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/yangon/id/read/hubungan-bilateral-indonesia-myanmar/1743/etc-menu#>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2019). *Humanitarian Issues*. Kemlu.Go.Id. https://kemlu.go.id/portal/en/read/88/halaman_list_lainnya/isu-isu-kemanusiaan
- Kenton, W. (2021, October 6). Foreign Aid. *Investopedia*.
- Komisi I DPR RI. (2015, August 24). Komisi I Terima LSM Peduli Rohingya.

- Dpr.Go.Id.*
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10887/t/Komisi+I+Terima+LSM+Peduli+Rohingya>
- Lancaster, C. (2007). *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics* (5th ed.). Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press.
<https://doi.org/10.1017/S1537592707072738>
- Leba, E. E. (2019, December 20). Bantuan Indonesia untuk Repatriasi Pengungsi Rohingya Mulai Bergulir. *Kompas.Id.*
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2019/12/20/bantuan-indonesia-untuk-repatriasi-pengungsi-rohingya-mulai-bergulir>
- Lefevre, A. S., & Cushing, C. (2017, October 1). Thailand says closely watching Myanmar crisis, ready to provide aid. *Reuters.*
<https://www.reuters.com/article/us-thailand-myanmar-rohingya-idUSKCN1C60XN>
- Lewis, A. (2016). The Politics of International Aid The Impact of Local Politics and International Priorities on Aid Allocation in Yemen. In *The Politics of Humanitarianism: Power, Ideology and Aid*. I.B.Tauris.
- Liputan 6. (2019, December 12). Pemerintah Indonesia Beri Bantuan Rumah Sakit Kepada Rohingya. *Liputan6.Com.*
<https://www.liputan6.com/global/read/4131912/pemerintah-indonesia-beri-bantuan-rumah-sakit-kepada-rohingya>
- Ludfiani, A., Hara, A. E., & Sunarko, B. S. (2017). Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya (Humanitarian Crisis and Thailand 's Effort in Overcoming the Wave of Rohingya Refugees). *E-Sospol, IV(2)*.
- Macrae, Joanna; Leader, N. (2000). The Politics of Coherence: Humanitarianism and Foreign Policy in the Post-Cold War Era. *HPG Briefing Paper, 1*, 1–6.
http://old.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/HPGMainstreaming_Safety_and_Security.pdf
- Maharani, T. (2017, December 7). Myanmar Terima Kasih ke Indonesia atas Bantuan di Krisis Rohingya. *Detik News.* <https://news.detik.com/berita/d-3759885/myanmar-terima-kasih-ke-indonesia-atas-bantuan-di-krisis-rohingya>
- Médecins Sans Frontières. (2017). *MSF surveys estimate that at least 6,700 Rohingya were killed during the attacks in Myanmar.* MSF.Org.
<https://www.msf.org/myanmarbangladesh-msf-surveys-estimate-least-6700-rohingya-were-killed-during-attacks-myanmar>
- Meilanova, D. R. (2019, June 13). 65 Muslim Rohingya yang Terdampar di Thailand Diduga Terkait Perdagangan Manusia. *Bisnis.Com.*
<https://kabar24.bisnis.com/read/20190613/19/933518/65-muslim-rohingya-yang-terdampar-di-thailand-diduga-terkait-perdagangan-manusia>
- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah.* https://jdih.kemlu.go.id/ildis/www/storage/document/JDIHPermenlu_15_Tahun_2020_ttg_Perubahan_Permenlu_No._11_Tahun_2019.pdf
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A*

- methods sourcebook* (Third Edit). SAGE Publication, Inc.
- Mohajan, H. K. (2019). History of Rakhine State and the Origin of Rohingya Muslims. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.22146/ikat.v2i2.34182>
- Morgenstern, E. M., & Brown, N. M. (2022). Foreign Assistance: An introduction to U.S. Programs and policy. *Congressional Research Service*, 1–46.
- Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1), 60–75. <https://doi.org/10.52447/gij.v1i1.755>
- Nugroho, S. P. (2018). *Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Bagi Pengungsi Rakhine*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-jokowi-serahkan-bantuan-bagi-pengungsi-rakhine>
- Nurhandayani, D. (2013). *Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya di Myanmar*. Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. (2017). *Indonesian Gov't Continues to Send Humanitarian Aid for Rohingya*. Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. <https://setkab.go.id/en/indonesian-govt-continues-to-send-humanitarian-aid-for-rohingya/>
- Paul, R. (2017, February 13). Malaysian aid ship to help Rohingyas arrives in Bangladesh. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-malaysia-bangladesh-idUSKBN15S179>
- Permata, I. M., D, N. H., & Sinulingga, A. A. (2019). Humanitarian Diplomacy: Indonesia's Response Toward Rohingya Humanitarian Crisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 1(1), 1–12.
- Prabowo, G. (2020, December 3). Krisis Rohingya di Myanmar. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar?page=all>
- Purwanto, H. (2016, December 29). Indonesia dispatches delivery of humanitarian aid to Rohingya. *Antara News*. <https://en.antaranews.com/news/108653/indonesia-dispatches-delivery-of-humanitarian-aid-to-rohingya>
- Regoli, N. (2019). *20 Advantages and Disadvantages of Foreign Aid to Developing Countries*. Connect US. <https://connectusfund.org/20-advantages-and-disadvantages-of-foreign-aid-to-developing-countries>
- Samosir, H. A. (2017, September 25). Pengungsi Rohingya Sembunyikan 3.000 Pil Narkoba di Dubur. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170925112635-106-243820/pengungsi-rohingya-semunyikan-3000-pil-narkoba-di-dubur>
- Santi, N. (2014, December 11). Indonesia Bangun Sekolah Rohingya di Myanmar. *Tempo.Co*. <https://dunia.tempo.co/read/627862/indonesia-bangun-sekolah-rohingya-di-myanmar>
- Saputra, A. M. (2020). The Aid to Myanmar, Excercising Power of Indonesia Under Jokowi's Leadership. *Jurnal Sentris*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4148.1-13>
- Sari, D. S., Hidayat, T., & Prastiti, A. (2018). Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 7(1), 1–

13. <https://doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>
- Satria, N., & Jamaan, A. (2013). Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakhine, Myanmar. *Jurnal Transnasional*, 5(1), 1–15.
- Setiawan, A., & Hamka, H. (2020). *Role of Indonesian Humanitarian Diplomacy toward Rohingya Crisis in Myanmar. August 2017.* <https://doi.org/10.4108/eai.5-11-2019.2292481>
- Sitorus, N. A. B., & Sinoel, E. K. (2019, August 16). Polisi tangkap pengungsi Rohingya di Medan. *Antara News.* https://www.antaraneews.com/berita/1015126/polisi-tangkap-pengungsi-rohingya-di-medan?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
- Suastha, R. D. (2017, February 28). Bangladesh: Rohingnya Picu Meningkatnya Peredaran Narkoba. *CNN Indonesia.* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170228105546-106-196697/bangladesh-rohingnya-picu-meningkatnya-peredaran-narkoba>
- Sugesti, T. (2019). *STF UIN Jakarta Gabung Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) Dirikan Bangunan di Rakhine State, Myanmar.* Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://www.stfuinjakarta.org/2019/04/25/stf-uin-jakarta-gabung-indonesian-humanitarian-alliance-ihadirikan-bangunan-di-rakhine-state-myanmar/#>
- Susetyo, H., Fitria, & Asyhari, R. (2016). *Rohingya: Stateless People and Nowhere To Go.* PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PAHAM) PUSAT INFORMASI DAN ADVOKASI ROHINGYA ARAKAN (PIARA) Jl.
- Taufiqqurahman, M. (2017, September 19). Kecuali dari Indonesia, Myanmar Tolak Bantuan untuk Etnis Rohingnya. *Detik News.* <https://news.detik.com/berita/d-3649373/kecuali-dari-indonesia-myanmar-tolak-bantuan-untuk-etnis-rohingya>
- Tempo. (2017, September 15). Rohingnya Aid from Indonesia Arrives in Bangladesh. *Tempo.Co.* <https://en.tempo.co/read/909318/rohingya-aid-from-indonesia-arrives-in-bangladesh>
- Tisnadibrata, I. L. (2017, September 13). Indonesia Kirim Bantuan untuk Pengungsi Rohingnya. *Benar News.* <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bantuan-indonesia-untuk-rohingya-09132017140124.html>
- Towle, R. (2017). *Challenges and Way Forward in Handling Rohingya refugees in Malaysia.* UNHCR Asia Pasific. <https://www.unhcr.org/news/latest/2017/3/59128a817/challenges-and-way-forward-in-handling-rohingya-refugees-in-malaysia.html>
- Tribun Jambi. (2016, December 7). Indonesia dan Myanmar Gelar Dialog Antar Agama, Selesaikan Konflik Etnis Rohingnya. *TribunNews.Com.* <https://jambi.tribunnews.com/2016/12/07/indonesia-dan-myanmar-gelar-dialog-antar-agama-selesaikan-konflik-etnis-rohingya>
- Triono. (2014). Peran ASEAN Dalam Konflik Etnis Rohingnya. *Jurnal TAPIs*, 10(2), 1–11.
- Triwahyuni, S. N., Wira Perdana, F., Setiawan, B., Irwan, I., & Wibisono, Y.

- (2021). Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2118–2125. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.481>
- UNHCR. (2019). *Rohingya Refugee Response - Bangladesh Population Factsheet*. 1–4. https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees
- UNOCHA. (2019). *Rohingya Refugee Crisis*. UNOCHA.Org. <https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis>
- Waluyo, A. (2017a, September 4). Jokowi Sampaikan Aksi Nyata Indonesia Untuk Etnis Rohingya. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-sampaikan-aksi-nyata-indonesia-untuk-etnis-rohingya/4014081.html>
- Waluyo, A. (2017b, September 13). Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi Rohingya. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-lepas-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya-/4027272.html>
- Williams, V. (2021). *Foreign Aid*. Encyclopedia Britannica.
- Yunita, R. (2019). *Upaya Diplomati Malaysia terhadap Myanmar dalam Menangani Pembantaian Etnis Muslim Rohingya (2015-2017)*. 6.
- Zhukova, E. (2020). Foreign Aid. In *Humanitarianism: Keywords*. Brill. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004431140_035